

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Brebes

Dapat Uang Transport Rp7 Juta Sebulan, Mobil Dinas Anggota DPRD Ditarik

<http://radartegal.com/berita-lokal/dapat-uang-transport-rp7-juta-sebulan-mobil-dinas.17337.html>

BREBES - Pemkab Brebes telah menarik puluhan unit mobil dinas yang dipakai oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sebagai gantinya, para wakil rakyat itu akan diberikan uang transport.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes Djoko Gunawan mengungkapkan penarikan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017. Di mana dalam PP tersebut menjelaskan tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Salah satunya penarikan kendaraan dinas.

"Kendaraan sudah kita tarik, tapi kita tidak ada halaman untuk menampungnya. Jadi masih kita titipkan di halaman kantor DPRD," katanya.

Djoko mengatakan uang transportasi sebagai pengganti kendaraan dinas akan diberikan pada anggaran perubahan tahun ini. Untuk nominalnya, anggota dewan akan mendapatkan uang transportasi senilai kurang lebih Rp7 juta rupiah.

"Iya kita sudah mengalokasikan uang transportasi pengganti kendaraan dinas Rp7 juta, namun bisa saja jumlah tersebut bisa berkurang atau bertambah," katanya.

Saat disinggung mengenai rencana ke depan kendaraan tersebut, Djoko mengatakan, nantinya kendaraan tersebut akan dibagikan ke beberapa dinas instansi. Peralnya, masing-masing dinas atau instansi masih ada beberapa yang kekurangan kendaraan dinas.

"Karena masih ada kepala bidang (kabid) yang belum mendapatkan kendaraan dinas, sehingga kendaraan dari dewan nanti akan kita sebar ke beberapa dinas instansi," tuturnya.

Tidak hanya tunjangan transportasi, anggota dewan juga akan mendapatkan tunjangan perumahan yang telah dikururkan sejak tahun lalu. Selain itu juga mendapat tunjangan reses yang diberlakukan bersamaan dengan tunjangan transportasi.

"Tunjangan tunjangan reses sebelumnya tidak didapatkan para anggota DPRD. Sedangkan tunjangan perumahan yang diterima anggota DPRD jumlahnya bervariasi mulai dari Rp11, Rp12 dan Rp13 juta. Selisihnya cuman satu juta, antara ketua, wakil, dan anggota," urainya.

Hingga kini, kata Djoko, pihaknya masih menunggu hasil kajian pihak ketiga dalam hal ini untuk menentukan besaran tunjangan tersebut.

"Kalau tunjangan transportasi secara penganggaran dialokasikan Rp7 juta per bulan untuk satu orang. Untuk tunjangan perumahan mungkin tidak beda jauh dari tahun lalu. Tapi yang aturan yang baru ini anggota dewan dapat tunjangan reses, sebelumnya hanya dapat biaya reses saja," ungkapnya.

Djoko tak membeberkan besaran berapa nilai tunjangan reses yang diterima anggota DPRD dalam setahun tiga kali. "Konsep tunjangannya berupa uang, tapi besarnya masih dikaji dulu. Nanti keputusannya apa, juga akan dipertimbangkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Kalau diperubahan ini dianggarkan Rp1,6 miliar untuk tunjangan lima bulan kedepan," imbuhnya. (ded/ism/zul)